

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 009/HK.01.01/K.JI-11/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Berita acara rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor 053/RT.02/K.JI-11/12/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah bertugas:
 - Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 - Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - Penanggung jawab bertugas:
 - Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:
 - Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - Anggota bertugas:
 - Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 Desember 2022

Ketua,



MIFTAHUL BADAR

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Miftahul Badar	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator/Pengarah
2	Toni Wijaya, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Amin Wahyudin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Amin Wahyudin	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Agus Priambodo	Plt. Sekretaris Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
8	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua
9	Saiful Lathifi, S.E.,M.M	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
10	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
V	Anggota		
11	Mokhamad Rokib	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
12	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
13	Robert Durianto, S.AP.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
14	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Sulkan	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Moh. Ilyas, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	Aldi Amriza Mahendra, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Tatag Taufani Amri, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Ebid Beny Putra, S.Pt.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua,

MIFTAHUL BADAR